

## EFEKTIFITAS PENGARUH JUMLAH UMK DAN UPAH MINIMUM TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJADI INDONESIA

<sup>a</sup>Muammar Fazri Ramadhan <sup>b</sup>Reza Juanda, B.Soc.Sc., M.Ec.Dev

\*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh

a Corresponding author: [mop.ammar.fr@gmail.com](mailto:mop.ammar.fr@gmail.com)

[juanda.reza@unimal.ac.id](mailto:juanda.reza@unimal.ac.id)



### ARTICLE INFORMATION ABSTRACT

#### Keywords:

Number of Micro and Small Enterprises, Minimum Wage, Labor Absorption.

*This study analyzed the effect of the number of Micro and Small Enterprises and the minimum wage on employment in Indonesia. This study used secondary data in the form of data on the number of workers in micro and small enterprises, the number of micro and small business units, and minimum wage data for three years (2017, 2018, and 2019) in Indonesia taken from the Central Bureau of Statistics. The data analysis method used is the panel data regression method with the help of Eviews. The results partially showed that the number of Micro and Small Enterprises significantly influenced employment in Indonesia, and y, the minimum wage did not significantly influence employment in Indonesia. Simultaneously, the number of Micro and Small Enterprises and the minimum significantly influenced employment in Indonesia.*

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, dimana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Diantara banyaknya pulau di Indonesia terdapat pulau yang bisa dikatakan besar di Indonesia yaitu Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera dan Papua. Indonesia juga memiliki jumlah penduduk yang besar. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada sensus penduduk tahun 2010 tercatat 237.641.326 jiwa penduduk Indonesia, Hal ini juga diikuti oleh tingkat kemiskinan yang tinggi.

Kemiskinan merupakan permasalahan disetiap negara, diantara penyebab kemiskinan yaitu pengangguran. Menurut BPS, pengertian penganggur ketika survey angkatan kerja nasional (sakernas) tahun 1986-2000, disebutkan bahwa penganggur merupakan masyarakat yang tidak mempunyai mata pencaharian, bersedia untuk bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Namun sejak tahun 2001 hingga kini pengertian penganggur menjadi mereka yang sedang berusaha mencari pekerjaan atau sedang membangun usaha, diterima kerja namun belum memulai kerja, dan tidak ada niatan untuk mencari pekerjaan lantaran merasa tidak mungkin menerima pekerjaan. (BPS, 2010)

Dalam mengatasi pengangguran dapat dilakukan dengan mengatasi penyebab-penyebab pengangguran diantaranya bisa dilakukan dengan menciptakan lapangan pekerjaan demi menampung

tenaga kerja. Lapangan pekerjaan tidak perlu usaha yang besar, peran Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMK) juga tidak kalah terasa pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja dan juga UMK tidak bisa dikucilkan.

Dengan adanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, hal ini akan menekan kemiskinan karena masyarakat yang awalnya tidak memiliki pekerjaan sudah mempunyai penghasilan dari upah tempatnya bekerja. Di Indonesia adanya upah minimum yang telah diatur oleh perundang-undangan yang dimana setiap provinsi atau daerah memiliki upah minimum yang berbeda-beda, hal ini dikarenakan biaya hidup di setiap daerah berbeda. Upah minimum bisa saja terjadi perubahan disetiap tahunnya.

**Tabel 1.1**  
**Upah Minimum Di Indonesia Tahun 2017, 2018 Dan 2019**

| No | Provinsi             | Upah Minimum (Rupiah) |             |             |
|----|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
|    |                      | 2017                  | 2018        | 2019        |
| 1  | Aceh                 | Rp2.500.000           | Rp2.717.750 | Rp2.916.810 |
| 2  | Sumatera Utara       | Rp1.961.354           | Rp2.132.188 | Rp2.916.810 |
| 3  | Sumatera Barat       | Rp1.949.284           | Rp2.119.067 | Rp2.916.810 |
| 4  | Riau                 | Rp2.266.722           | Rp2.464.154 | Rp2.916.810 |
| 5  | Jambi                | Rp2.063.948           | Rp2.243.718 | Rp2.916.810 |
| 6  | Sumatera Selatan     | Rp2.388.000           | Rp2.595.995 | Rp2.916.810 |
| 7  | Bengkulu             | Rp1.737.412           | Rp1.888.741 | Rp2.916.810 |
| 8  | Lampung              | Rp1.908.447           | Rp2.074.673 | Rp2.916.810 |
| 9  | Kep. Bangka Belitung | Rp2.534.673           | Rp2.755.443 | Rp2.916.810 |
| 10 | Kep. Riau            | Rp2.358.454           | Rp2.563.875 | Rp2.916.810 |
| 11 | Dki Jakarta          | Rp3.355.750           | Rp3.648.035 | Rp2.916.810 |
| 12 | Jawa Barat           | Rp1.420.624           | Rp1.544.360 | Rp2.916.810 |

|    |                     |             |             |             |
|----|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 13 | Jawa Tengah         | Rp1.367.000 | Rp1.486.065 | Rp2.916.810 |
| 14 | Di Yogyakarta       | Rp1.337.645 | Rp1.454.154 | Rp2.916.810 |
| 15 | Jawa Timur          | Rp1.388.000 | Rp1.508.894 | Rp2.916.810 |
| 16 | Banten              | Rp1.931.180 | Rp2.099.385 | Rp2.916.810 |
| 17 | Bali                | Rp1.956.727 | Rp2.127.157 | Rp2.916.810 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | Rp1.631.245 | Rp1.825.000 | Rp2.916.810 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | Rp1.525.000 | Rp1.660.000 | Rp2.916.810 |
| 20 | Kalimantan Barat    | Rp1.882.900 | Rp2.046.900 | Rp2.916.810 |
| 21 | Kalimantan Tengah   | Rp2.227.307 | Rp2.421.305 | Rp2.916.810 |
| 22 | Kalimantan Selatan  | Rp2.258.000 | Rp2.454.671 | Rp2.916.810 |
| 23 | Kalimantan Timur    | Rp2.339.556 | Rp2.543.331 | Rp2.916.810 |
| 24 | Kalimantan Utara    | Rp2.358.000 | Rp2.559.903 | Rp2.916.810 |
| 25 | Sulawesi Utara      | Rp2.598.000 | Rp2.824.286 | Rp2.916.810 |
| 26 | Sulawesi Tengah     | Rp1.807.775 | Rp1.965.232 | Rp2.916.810 |
| 27 | Sulawesi Selatan    | Rp2.435.625 | Rp2.647.767 | Rp2.916.810 |
| 28 | Sulawesi Tenggara   | Rp2.002.625 | Rp2.177.052 | Rp2.916.810 |
| 29 | Gorontalo           | Rp2.030.000 | Rp2.206.813 | Rp2.916.810 |
| 30 | Sulawesi Barat      | Rp2.017.780 | Rp2.193.530 | Rp2.916.810 |
| 31 | Maluku              | Rp1.925.000 | Rp2.222.220 | Rp2.916.810 |
| 32 | Maluku Utara        | Rp1.975.152 | Rp2.320.80  | Rp2.916.810 |
| 33 | Papua Barat         | Rp2.421.500 | Rp2.667.000 | Rp2.916.810 |
| 34 | Papua               | Rp2.663.646 | Rp2.895.650 | Rp2.916.810 |

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, 2018 dan 2019

Pernah terjadi krisis ekonomi yang melanda dunia bahkan negara besar seperti Amerika Serikat juga merasakan dampaknya, namun walaupun demikian krisis ekonomi tersebut hampir tidak dirasakan oleh negara Indonesia karena perekonomian Indonesia ditopang oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMK). Negara-negara di belahan bumi, baik negara maju maupun negara berkembang pasti adanya Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di dalam negara tersebut, yang dimana usaha ini tidak bisa dianggap remeh karena memegang peran yang sangat penting di dalam perekonomian suatu negara, terutama pada penyediaan tenaga kerja dan juga salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang dikemukakan oleh *Stiglitz* bahwa usaha kecil sering kali berperan menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat, maka sudah sepatutnya pemerintah memerhatikan usaha-usaha kecil.

Dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan kemampuan (*skill*), sehingga memunculkan keinginan orang-orang untuk membuka usahanya sendiri. Dengan keterbatasan dana sehingga hanya dapat mendirikan usaha yang dapat digolongkan kepada usaha mikro ataupun usaha kecil, walaupun demikian sangat membantu negara dalam mengurangi angka pengangguran dan juga dalam memberantas kemiskinan. Dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh Usaha Mikro (UMI) dan Usaha Kecil (UK) ini membuat pemerintah melakukan beberapa kebijakan untuk memperkuat Usaha Mikro dan Kecil dalam persaingan perdagangan dalam negeri maupun internasional.

Melalui efek positif pasar tenaga kerja (*labour market effect*), yaitu meningkatnya jumlah usaha, jumlah tenaga kerja, dan pengusaha baru khususnya di UKM, akibat meningkatnya jumlah pekerja di sektor formal yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Oleh karena suatu keharusan untuk menyambung hidup, sebagian besar dari pekerja tersebut mau tidak mau harus melakukan kegiatan ekonomi apasaja yang dapat dilakukan dengan modal seadanya dan sumber daya lainnya yang dimiliki saat itu, termasuk membuka usaha skala kecil sendiri atau bekerja di UK milik orang lain yang masih dapat beroperasi. (Tambunan, 2001)

Pada kondisi krisis ekonomi, Usaha Kecil (UK) di Indonesia terbukti merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat karena kegiatannya menyentuh langsung kebutuhan hidup masyarakat, terutama rakyat kecil dan terbukti kuat dalam menghadapi badai krisis ekonomi. Pada sebuah kegiatan perekonomian suatu negara, tidak semua kegiatan produksi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif melalui usaha skala besar. Itulah sebabnya di banyak negara industri maju, keberadaan UK menjadi mutlak. Pada masyarakat industri maju, lebih dari 40% pelaku bisnis adalah Industri Kecil. (Singgih, 2001)

Singgih berpendapat dengan Chaterwood yang mempunyai keyakinan bahwa Usaha Kecil (UK) akan selalu mempunyai tempat (*share*) baik di masa kini maupun masa mendatang. Usaha Kecil secara dinamis mencari dan mengisi relung-relung pasar yang tidak digarap atau tidak sempat digarap oleh Usaha Menengah (UM) atau Usaha Besar (UB), sehingga dalam perekonomian Indonesia, tidaklah perlu diperdebatkan lagi bahwa UK menduduki posisi yang strategis. UK dapat berperan sebagai sarana dalam pertumbuhan sekaligus pemerataan sebagai tujuan utama pembangunan. Singgih menyatakan bahwa berdasarkan data Departemen Perindustrian dan Perdagangan, populasi UK secara absolut terus bertambah dari tahun ke tahun, disertai dengan bertambahnya tenaga kerja yang bekerja di sektor ini (Singgih, 2001).

Berdasarkan kenyataan ini, dapat dikatakan bahwa Usaha Kecil Menengah (UKM), khususnya UK memegang peranan penting di Indonesia. Peranan penting tersebut terutama dalam membangun pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja sehingga dapat dijadikan sebagai penyelamat ekonomi nasional dalam masa proses pemulihan ekonomi nasional. Sektor UK identik dengan rakyat kecil yang memiliki potensi besar untuk mengikis kemiskinan dan pengangguran, selaras dengan *Millenium Development Goals* (MDGs). MDGs adalah proyek kemanusiaan yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama 15 tahun (2000 – 2015) dan disepakati semua anggota PBB. (Maskur, 2007)

**Tabel 1.2**  
**Jumlah UMK Di Indonesia Tahun 2017, 2018 Dan 2019**

| NO | PROVINSI             | 2017    | 2018    | 2019    |
|----|----------------------|---------|---------|---------|
| 1  | Aceh                 | 99.277  | 114.042 | 106.918 |
| 2  | Sumatera Utara       | 152.466 | 140.608 | 127.152 |
| 3  | Sumatera Barat       | 116.539 | 108.588 | 100.712 |
| 4  | Riau                 | 65.733  | 77.876  | 59.837  |
| 5  | Jambi                | 27.792  | 34.564  | 28.159  |
| 6  | Sumatera Selatan     | 69.868  | 73.564  | 80.307  |
| 7  | Bengkulu             | 26.780  | 28.271  | 21.667  |
| 8  | Lampung              | 99.271  | 95.493  | 95.041  |
| 9  | Kep. Bangka Belitung | 26.348  | 25.588  | 22.799  |
| 10 | Kep. Riau            | 34.394  | 29.995  | 17.031  |
| 11 | Dki Jakarta          | 76.028  | 37.850  | 62.929  |
| 12 | Jawa Barat           | 574.175 | 536.207 | 629.597 |
| 13 | Jawa Tengah          | 892.631 | 914.850 | 912.421 |
| 14 | Di Yogyakarta        | 97.319  | 113.430 | 146.658 |

|    |                     |         |         |         |
|----|---------------------|---------|---------|---------|
| 15 | Jawa Timur          | 852.301 | 779.390 | 862.450 |
| 16 | Banten              | 105.710 | 109.959 | 113.139 |
| 17 | Bali                | 149.179 | 118.509 | 161.120 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 116.870 | 96.205  | 108.481 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 161.257 | 162.234 | 140.163 |
| 20 | Kalimantan Barat    | 55.044  | 52.835  | 43.024  |
| 21 | Kalimantan Tengah   | 34.587  | 31.640  | 25.463  |
| 22 | Kalimantan Selatan  | 88.272  | 70.362  | 57.753  |
| 23 | Kalimantan Timur    | 33.098  | 33.725  | 32.042  |
| 24 | Kalimantan Utara    | 7.338   | 6.082   | 7.194   |
| 25 | Sulawesi Utara      | 67.230  | 48.451  | 37.031  |
| 26 | Sulawesi Tengah     | 87.190  | 89.424  | 85.379  |
| 27 | Sulawesi Selatan    | 123.379 | 109.179 | 129.823 |
| 28 | Sulawesi Tenggara   | 67.883  | 69.994  | 49.435  |
| 29 | Gorontalo           | 36.950  | 30.022  | 28.715  |
| 30 | Sulawesi Barat      | 22.446  | 26.692  | 26.295  |
| 31 | Maluku              | 41.867  | 45.959  | 25.004  |
| 32 | Maluku Utara        | 31.908  | 29.311  | 14.213  |
| 33 | Papua Barat         | 11.077  | 7.306   | 6.743   |
| 34 | Papua               | 12.481  | 15.842  | 15.481  |

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Pekerja Pada UMK Di Indonesia Tahun 2017,**  
**2018 Dan 2019**

| NO | PROVINSI             | JP MK     | JP MK     | JP MK     |
|----|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | Aceh                 | 181.303   | 204.312   | 186.759   |
| 2  | Sumatera Utara       | 324.964   | 292.487   | 261.087   |
| 3  | Sumatera Barat       | 217.583   | 202.330   | 185.817   |
| 4  | Riau                 | 152.356   | 161.034   | 119.415   |
| 5  | Jambi                | 54.587    | 69.671    | 49.241    |
| 6  | Sumatera Selatan     | 154.601   | 170.012   | 158.294   |
| 7  | Bengkulu             | 53.295    | 51.877    | 43.716    |
| 8  | Lampung              | 231.989   | 202.775   | 199.034   |
| 9  | Kep. Bangka Belitung | 48.407    | 43.213    | 39.420    |
| 10 | Kep. Riau            | 60.930    | 54.145    | 29.141    |
| 11 | Dki Jakarta          | 305.213   | 149.244   | 214.730   |
| 12 | Jawa Barat           | 1.455.352 | 1.294.220 | 1.384.775 |
| 13 | Jawa Tengah          | 1.938.390 | 1.888.295 | 1.874.926 |
| 14 | Di Yogyakarta        | 195.163   | 216.803   | 298.952   |
| 15 | Jawa Timur           | 2.716.163 | 2.114.453 | 2.380.673 |
| 16 | Banten               | 268.195   | 258.112   | 235.022   |
| 17 | Bali                 | 296.811   | 206.669   | 274.386   |
| 18 | Nusa Tenggara Barat  | 350.771   | 259.140   | 261.495   |
| 19 | Nusa Tenggara Timur  | 287.120   | 281.469   | 228.197   |
| 20 | Kalimantan Barat     | 111.848   | 112.527   | 88.424    |
| 21 | Kalimantan Tengah    | 68.221    | 58.527    | 49.093    |
| 22 | Kalimantan Selatan   | 144.381   | 121.193   | 103.875   |
| 23 | Kalimantan Timur     | 64.758    | 63.690    | 64.863    |
| 24 | Kalimantan Utara     | 12.669    | 11.953    | 14.030    |
| 25 | Sulawesi Utara       | 131.503   | 94.647    | 64.075    |
| 26 | Sulawesi Tengah      | 236.127   | 227.189   | 202.207   |
| 27 | Sulawesi Selatan     | 263.986   | 207.809   | 262.044   |

|    |                   |         |         |        |
|----|-------------------|---------|---------|--------|
| 28 | Sulawesi Tenggara | 137.303 | 139.243 | 98.587 |
| 29 | Gorontalo         | 75.358  | 64.812  | 54.109 |
| 30 | Sulawesi Barat    | 43.595  | 51.211  | 49.752 |
| 31 | Maluku            | 67.798  | 69.049  | 35.719 |
| 32 | Maluku Utara      | 82.010  | 50.764  | 23.818 |
| 33 | Papua Barat       | 20.525  | 13.607  | 12.437 |
| 34 | Papua             | 25.321  | 27.776  | 27.333 |

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, 2018 dan 2019

Dari data diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa UMI dan UK sangat teras dampakya terhadap penyerapan tenaga kerja, dengan demikian sangat dibutuhkan perhatian khusus dari pemerintah demi bertahannya usaha tersebut. Penulis tertarik melakukan penelitian ini ialah dikarenakan masyarakat Indonesia maupun instansi pemerintah sering kali usaha mikro dan kecil ini dipandang sebelah mata, dengan ketertarikan tersebut penulis mendapati suatu fenomena yang dimana teori penyerapan tenaga kerja tidak sinkron dengan data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai contoh yang terjadi di provinsi Sumatera Selatan yang dimana pada tahun 2018 jumlah UMK sebanyak 73.564 unit dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 170.012 jiwa, selanjutnya apabila kita melihat pada tahun 2019 jumlah UMK terjadi peningkatan menjadi sebanyak 80.307 unit dengan penyerapan tenaga kerja yang seharusnya meningkat apabila kita merujuk kepada teori para ahli namun pada tahun 2019 malah menurun yaitu penyerapan tenaga kerja hanya sebanyak 158.294 jiwa, inilah salah satu bukti ketidaksinkronan antara teori dengan data yang tersaji di lapangan.

Dari apa yang telah diuraikan diatas, cukup menjadi alasan untuk melakukan penelitian yang akan mencoba menganalisis pengaruh jumlah Usaha Mikro (UMI) Usaha Kecil (UK) dan Upah Minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

## 2. Tinjauan Teoritis Usaha Mikro Kecil

Banyak sekali pengertian dari Usaha Mikro dan Kecil (UMK), namun apabila kita merujuk ke Undang-Undang No.20 pasal 1 tahun 2008, kita bisa mendapati pengertian Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Adapun kriterianya disebutkan dalam pasal 6 No.9 tahun 2008 yaitu (1) memiliki aset bersih paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau (2) memiliki omset tahunan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). (Undang-Undang, 2008)

Sedangkan pengertian Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari perusahaan menengah ataupun besar, yang dimana aset bersih paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki omset paling banyak sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) pertahun. (Undang-Undang, 2008)

## Upah Minimum

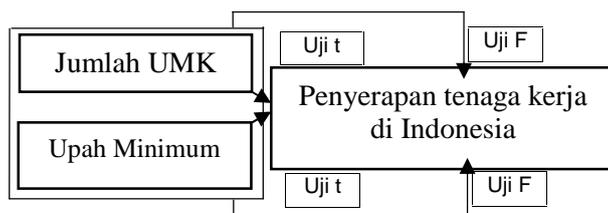
Di dalam UU No.13 tahun 2003 disebutkan sebagaimanakebutuhanbiayahidup di setiapprovinsiberbeda-bedamakapah minimum merupakan suatustandarpengupahan yang digunakan para pengusahakepadatenagakerja di tempatusahanyaberada,olehsebabitudisebutupah minimum provinsi.

### Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja dapat diartikan secara luas yakni menyerap tenaga kerja dalam arti menghimpun orang atau tenaga kerja di suatu lapangan usaha. Lapangan usaha yang tersedia tidak mampu menyerap tenaga kerja dalam kondisi yang siap pakai. Disinilah perlunya peranan pemerintah untuk mengatasi masalah kualitas tenaga kerja melalui pembangunan pendidikan, peningkatan kualitas tenaga kerja yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai IPTEK, serta pelatihan keterampilan dan wawasan yang luas sehingga mempermudah proses penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan.(Mulyadi, 2008)

### Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran yang dimaksud yaitu:



**Gambar 2.1**  
Kerangka pemikiran

Dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa jumlah usaha mikro, jumlah usaha kecil dan upah minimum memberikan pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja Indonesia. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penyerapan tenaga kerja di Indonesia (Y), dan yang menjadi variabel bebas adalah jumlah UMK (X1) dan upah minimum (X2). Penelitian ini di uji dengan dua pengujian yaitu uji t (parsial) merupakan pengujian untuk melihat seberapa berpengaruh masing-masing variabel secara individu terhadap variabel terikatnya. Uji f (simultan atau serentak) adalah pengujian untuk melihat seberapa berpengaruh semua variabel bebas secara Bersama-sama terhadap variabel terikat.

### Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan pada penelitian.

Ha1: Diduga jumlah UMK berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia

Ha2: Diduga upah berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia

Ha3: Diduga jumlah UMK dan upah berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

### Metode Penelitian

#### Objek Dan Lokasi Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah jumlah UMK dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Lokasi dalam penelitian ini adalah provinsi-provinsi di Indonesia yang kontra dengan teori para ahli tentang penyerapan tenaga kerja, adapun provinsi yang kontra dengan teori para ahli yaitu Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

#### Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder sendiri adalah data yang mendukung data primer yaitu segala bentuk data yang diperoleh melalui kepustakaan (library research) baik berupa majalah, jurnal, artikel maupun dari berbagai hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pada penelitian ini penulis mengambil data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

#### Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, sudah semestinya peneliti mengetahui metode pengumpulan data yang digunakan, karena metode pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam meneliti sehingga jelas dan memenuhi standar dalam memperoleh data. Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengambilan data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang dibutuhkan oleh peneliti, diantaranya jumlah tenaga kerja pada usaha mikro dan kecil, jumlah unit usaha mikro dan usaha kecil dan juga data upah minimum selama tiga tahun (2017, 2018 dan 2019) di Indonesia.

#### Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dilihat dari keterkaitan variabel satu dengan variabel yang lain, maka macam-macam variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen.

- Variabel Independen adalah variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi variabel terikat.
- Variabel dependen adalah variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi oleh keberadaan variabel bebas. (Sugiyono, 2011)

Adapun variabel dependen pada penelitian ini yaitu penyerapan tenaga kerja pada usaha mikro dan usaha kecil di Indonesia pada tahun 2017, 2018 dan 2019. Sedangkan Variabel Independen pada penelitian ini terdapat dua, yaitu jumlah unit UMK (Usaha Mikro Dan Kecil) dan juga upah minimum Indonesia tahun 2017, 2018 dan 2019.

## Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data yang bertujuan untuk memperoleh data penulisan ini, penulis menggunakan metode kuantitatif, yaitu dengan suatu metode menganalisis data yang diperoleh dalam bentuk angka dan selanjutnya akan dibahas serta dianalisis dengan menggunakan alat statistik dengan metode Analisis regresi data panel melalui sarana program *EViews*.

Menurut Gujarati data panel adalah gabungan antara data *time series* dan *cross section*. Data *time series* adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap individu, sedangkan data *cross section* data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu. Ada 3 model dalam mengestimasi regresi dengan data panel yaitu:

- 1) *Common Effect Model*, dalam model ini mengabaikan dimensi waktu ruang, karena intercept dan koefisien slope di anggap konstan dan dalam melakukan melakukan regresi digunakan langsung regresi OLS.
- 2) *Fixed Effect Model*, dalam analisis ini memiliki asumsi adanya perbedaan *intercept* antara individu, tetapi intercept antara waktunya sama dan koefisien regresi atau *slope* sama antara individu dan waktu.
- 3) *Random Effect Model*, dalam model ini memiliki asumsi bahwa *slope* antara individu adalah sama, tetapi *intercept* berbeda baik antar individu maupun waktu sementara rata-rata tiap *intercept* nya sama.

Model persamaannya adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 X_{1it} + \alpha_2 X_{2it} + \alpha_3 X_{3it} + e$$

Dimana :

- $Y_{it}$  : Penyerapana tenaga kerja  
 $\alpha_0$  : Konstanta  
 $\alpha_1 \alpha_2$  : Koefisien regresi  
 $X_1$  : Jumlah usaha UMK  
 $X_2$  : Upah minimum  
 $e$  : error  
 $i$  : unit *cross section* (individual)  
 $t$  : periode waktu

## Pengujian Hipotesis

### Uji Parsial (Uji T)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah secara *individual variable* bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel tak bebas, dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Hipotesis yang dilakukan sebagai berikut:

$H_0$ :  $\beta_i = 0$ , artinya suatu variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel tak bebas.

$H_1$ :  $\beta_i > 0$ , artinya suatu variabel bebas berpengaruh terhadap variabel tak bebas.

### Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel tak bebas. Hipotesis statistik dalam pengujian ini adalah:

$H_0$ :  $\beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$ , artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel tak bebas.

$H_1$ :  $\beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$ , artinya variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel tak bebas.

## Koefisien Determinasi

Pengujian ini dimaksudkan untuk menentukan seberapa besar variabel tak bebas yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel bebasnya dengan menggunakan perhitungan koefisien determinasi (*determination coefficient*) yang disimbolkan dengan  $R^2$ . Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu ( $0 < R^2 < 1$ ). Secara sistematis dirumuskan sebagai berikut:

- a) Jika nilai  $R^2$  kecil (mendekati nol), berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas, maka dapat disimpulkan antara variabel bebas dan variabel tak bebas tidak ada keterkaitan.
- b) Jika nilai  $R^2$  mendekati 1 (satu), berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen, maka dapat disimpulkan antara variabel bebas dan variabel tak bebas ada keterkaitan.

## Hasil Penelitian

### Uji Asumsi Klasik

Dikarenakan data panel dapat meminimalkan bias yang kemungkinan besar berpengaruh dalam hasil analisis dan dapat memberikan lebih banyak informasi, variasi dan derajat of freedom maka uji asumsi klasik tidak diperlukan. (Damodar Gujarati, 2001)

### Hasil Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel 4.7 kita bisa melihat bahwa Adjusted R-squared dalam penelitian ini adalah sebesar 0,894991, hal ini menunjukkan bahwa hubungan variabel bebas dengan variabel terikat dalam penelitian ini berhubungan sangat kuat yaitu sebesar 89,49% sedangkan 10,51% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

### Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji T)

Berdasarkan tabel 4.8 kita bisa mengetahui bahwasanya nilai  $T_{\text{statistik}}$   $X_1$  (jumlah UMK) yaitu 16.51413 lebih besar dari  $T_{\text{tabel}}$  yaitu sebesar 2.70791 yang berarti variabel jumlah UMK berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, Sedangkan untuk  $X_2$  (jumlah UMP) nilai  $T_{\text{statistik}}$  yaitu -1.417875 lebih kecil dari  $T_{\text{tabel}}$  yaitu sebesar 1.68488 yang berarti bahwa variabel jumlah UMP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

### Koefisien Regresi Secara Bersama-Sama (Uji F)

Berdasarkan hasil pada tabel 4.9, maka diperoleh uji F adalah  $(k-1)(n-k) = (3-1)(42-3) = (2)(39)$  maka angka yang dilihat pada F tabel berada pada kolom 2 baris ke 39. Oleh karena F hitung  $>$  F tabel atau  $175,72 > 5,18$  maka secara bersama-sama variabel jumlah UMK dan upah minimum berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja. Hal ini bisa dilihat dari probabilitas sebesar  $0.00000 < 0,01$ .

## Hasil Dan Pembahasan Pengaruh Jumlah Umk Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Dari hasil uji secara parsial (individu) di atas dapat dilihat bahwa variabel jumlah UMK berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Secara teori apabila jumlah usaha meningkat maka akan meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Veronica Nuryanti (2003) yang menyatakan bahwa jumlah unit usaha, nilai investasi, dan nilai output berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja pada usaha rumah tangga di Kabupaten Banyumas.

### **Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Dari hasil uji secara parsial (individu) di atas dapat dilihat bahwa variabel upah minimum berpengaruh secara negative namun tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Diah Nur Fadilah (2012) yang menyatakan bahwa upah berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Penurunan tingkat upah 1% akan berpengaruh pada peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 0,0057% di kota Tegal.

### **Pengaruh Jumlah Umk Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia**

Dari dua variabel bebas yaitu jumlah UMK dan upah minimum yang diperuntukan untuk menyerap tenaga kerja maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa Sebagaimana pada uji F yang telah diketahui bahwasanya secara bersama-sama variabel jumlah UMK dan upah minimum berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja.

### **Penutup Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis pengaruh jumlah UMK dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia yang telah dibahas dengan menggunakan analisis data panel, maka penulis mengambil kesimpulan:

1. Secara parsial variabel UMK berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
2. Secara parsial variabel upah minimum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Secara simultan untuk variabel jumlah UMK dan upah minimum berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

### **Saran**

1. Bagi instansi pemerintah terkait ketenagakerjaan untuk lebih memperhatikan aspek UMK, sebagaimana yang telah kita ketahui di dalam penelitian ini bahwa UMK sangat berdampak dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
2. Bagi instansi pemerintah yang terkait untuk aspek upah harus tetap selalu diperhatikan dengan kebutuhan hidup di setiap daerah, seperti yang kita ketahui bahwa kebutuhan hidup di setiap daerah itu berbeda-beda demi menunjang kestabilan penyerapan tenaga kerja.

### **Daftar Pustaka**

- Adnan Husada Putra. (2016). Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora. *Jurnal Analisa Sosiologi*. <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/18162>
- BPS. (2010). *Pengangguran*. 2010. <http://www.bps.go.id>
- Damodar Gujarati. (2001). *Ekonometrika Dasar (terjemahan)*. Jakarta: Erlangga. <https://adoc.pub/grant-rm-contemporary-strategic-analysis-4th-ed-oxford-black.html>
- Maskur, F. . (2007). Tantangan Koperasi Mengikis Kemiskinan. *Laporan Khusus Koperasi & UKM*. <http://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/3736>
- Mulyadi. (2008). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat. <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1028>
- Purnama, C. (2010). Motivasi dan Kemampuan Usaha Dalam meningkatkan Keberhasilan Usaha Industri Kecil (Studi Pada Industri Kecil Sepatu di Jawa Timur). *JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN*, 2, 177–184.
- Singgih, N. (2001). Kajian Pembinaan Industri Kecil dalam Memperkuat Struktur Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi*. <http://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/3736>
- Sitanggang dan Djalal Nachrowi. (2004). *Kebijakan Ketenagakerjaan dengan Orientasi Pada Data dan Fenomena Global*. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/11120/>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, T. (2001). *Kewirausahaan: Manajemen Usaha Kecil*. Salemba Empat.
- Undang-Undang. (2008). *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*.